

Judul : Kode Etik Harus Jadi Landasan Perilaku
Tanggal : Senin, 02 April 2018
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Kode Etik Harus Jadi Landasan Perilaku



Lucius Karus
Peneliti Formappi

APAKAH anggota Dewan periode selanjutnya ini akan mematuhi kesepakatan yang telah diatur dalam UU MD3, khususnya mengenai pemilihan pimpinan DPR/MPR?

Tentu saja DPR selalu bisa mengingkari kesepakatan yang ada di UU dengan kewenangan mereka di bidang legislasi. Kalau real politik menuntut ada perkembangan mereka dengan mudah bisa mendorong revisi lagi untuk mengejawantahkan keinginan mereka.

Mengapa demikian?

Karakter parpol dan DPR Rita memang tidak bisa memastikan bahwa kesepakatan yang mereka buat melalui UU MD3 sekarang bisa sewaktu-waktu diubah jika mayoritas kelompok menginginkannya. Corak pragmatisme politik partai-partai kita selalu menyiripkan ketidakpastian dalam soal pembuatan regulasi yang secara langsung terkait dengan kepentingan politik mereka.

Apakah etis bila anggota dewan yang merupakan perpanjangan dari parpol ini sesukanya mengubah regulasi demi kepentingan kelompoknya?

Pasal 2 Peraturan DPR No 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik jelas mengatur etika pelaksanaan tugas DPR yang mesti diabdikan untuk kepentingan umum. Jadi, mestinya ketika UU yang dihasilkan DPR hanya menampung kepentingan sepihak, baik DPR maupun parpol, maka mereka sesungguhnya telah melanggar kode etik yang menjadi landasan perilaku setiap anggota dalam menjalankan tugas dan kewenangan.

Meskipun UU MD3 mengatur urusan internal anggota dewan, bukan berarti mereka bisa sesukanya merombak UU tersebut, ya?

Kepentingan publik/rakyat menjadi satu-satunya alasan sebuah regulasi disusun dan dihasilkan DPR. Ketika hasilnya justru menyirip dari tujuan kepentingan publik, DPR sudah membangkang kesepakatan mereka sendiri soal bagaimana jabatan mereka dimaknai secara etis. Kan walaupun mengatur internal kelenbagaan, UU MD3 tetap saja harus terarah pada bagaimana menciptakan lembaga DPR yang bisa mengabdikan pada kepentingan publik/rakyat.

Apakah di periode pasca-Pemilu 2019, bagi-bagi kursi kekuasaan akan muncul?

Saya kira semangat bagi-bagi kursi masih menjiwa semangat parpol peserta Pemilu 2019. Selagi tak ada perubahan mendasar, bagi-bagi kursi akan jadi panorama utama. (Nur/P-3)